

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak dan penanggulangan yang dirasakan oleh kontraktor berskala usaha kecil dan menengah yang berada pada wilayah DKI Jakarta, wilayah Jawa Barat, serta wilayah Jawa Barat yakni :

1. Kontraktual
 - Setuju dengan anggapan bahwa COVID-19 termasuk sebagai keadaan *force majeure* dengan anggapan bahwa apabila ada masalah maka dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.
 - Meskipun demikian, masih banyak kontraktor yang tidak memasukkan klausul *force majeure* dalam kontrak kerja.
2. Operasional di Lapangan
 - Pelaksanaan protokol kesehatan di area konstruksi yang memiliki beberapa celah seperti :
 - a. Pekerja tidak taat terhadap protokol kesehatan seperti jarang menggunakan masker serta masih banyak yang jarang melakukan pengecekan suhu tubuh
 - b. Masih ada kontraktor yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.
 - Kegiatan *social distancing* sangat sulit untuk dilaksanakan di lapangan terutama banyak pekerjaan yang perlu dilakukan secara berdampingan.
 - Terjadi kelangkaan sejumlah material seperti material elektronik tertentu dan besi hollow pada beberapa kasus dikarenakan kesulitan transportasi material akibat adanya PSBB pada sejumlah wilayah atau beberapa toko tutup. Diatasi dengan kontraktor yang mengubah spesifikasi beberapa barang yang langka serta mengubah menggunakan *supplier* lokal.

- Kontraktor melakukan kerja lembur dan penambahan *shift* pekerjaan untuk mengejar laju konstruksi yang terlambat.

3. Manajemen

- Akibat dari merugi yang tidak kunjung selesai, maka ada beberapa subkontraktor yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang menyebabkan laju pekerjaan terhambat sementara. Dari pihak kontraktor mengambil uang jaminan dari subkontraktor sebagai kompensasi dan segera mengganti dengan subkontraktor lain yang lebih mampu.
- Kontraktor mengalami kerugian akibat pekerjaan yang terlambat maka kontraktor melaksanakan klaim agar diberi kompensasi waktu oleh pengguna jasa.

4. Perekonomian

- Terjadi pergeseran *cashflow* akibat berbagai masalah yang terjadi dan berakibat pada mundurnya laju proyek sehingga pembayaran tidak dapat kunjung dilakukan.
- Ada cukup banyak pengguna jasa yang terlambat melakukan pembayaran kepada kontraktor maka kontraktor menahan pekerjaan selanjutnya sambil membahas perihal kapan akan dibayarkannya kewajiban dari pengguna jasa..
- Kontraktor melakukan pengurangan gaji pekerja dan pengurangan sejumlah pekerja untuk mengurangi pembengkakan biaya yang dialami.
- Pemerintah memberi bantuan berupa bantuan insentif pajak untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh kontraktor.

5.2 Saran

Beberapa saran agar penelitian menjadi lebih sempurna apabila ada penelitian sejenis pada masa mendatang adalah :

1. Memperdalam aspek-aspek yang dipertanyakan supaya dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam

2. Melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan gambaran dampak dan penanggulangan perilaku antar daerah contoh pada masing-masing daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
3. Melakukan penelitian perbedaan perilaku antara kontraktor menengah dan kontraktor kecil, serta perbedaan perilaku pada kontraktor yang bersifat perorangan dan bersifat perusahaan.
4. Menambah jumlah wilayah yang diteliti untuk menemukan perbedaan perilaku daerah lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dibuat, juga diharapkan dapat memberi manfaat selain mendapatkan gambaran dampak dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh kontraktor berskala usaha kecil dan menengah, menjadi *platform* bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya bagi kontraktor kecil dan menengah dalam menghadapi pandemi saat ini maupun pandemi serupa di masa mendatang. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain :

1. Memperketat Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Proyek Konstruksi.

Karena masih banyak yang tidak menjalankan protokol dengan baik, diharapkan di kedepannya akan diperketat aturan yang ada seperti mewajibkan setiap proyek konstruksi seberapa kecil skala proyeknya harus tetap memiliki divisi K3 atau penanggung jawab yang mengawasi jalannya protokol kesehatan dengan baik. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dengan protokol maka proyek dihentikan sementara, kontraktor diminta membuat surat pernyataan apabila melanggar protokol kembali maka bersedia untuk proyek dihentikan. Tujuan utamanya adalah supaya pihak yang berada di lapangan lebih patuh dalam menjalankan protokol yang ada.

2. Penyesuaian Insentif Pajak

Karena masih ada banyak pihak yang belum menerima bantuan insentif pajak dari pemerintah, mungkin dapat diterapkan kebijakan baru dengan melalui proses pertimbangan misal memperluas kategori penerima bantuan insentif

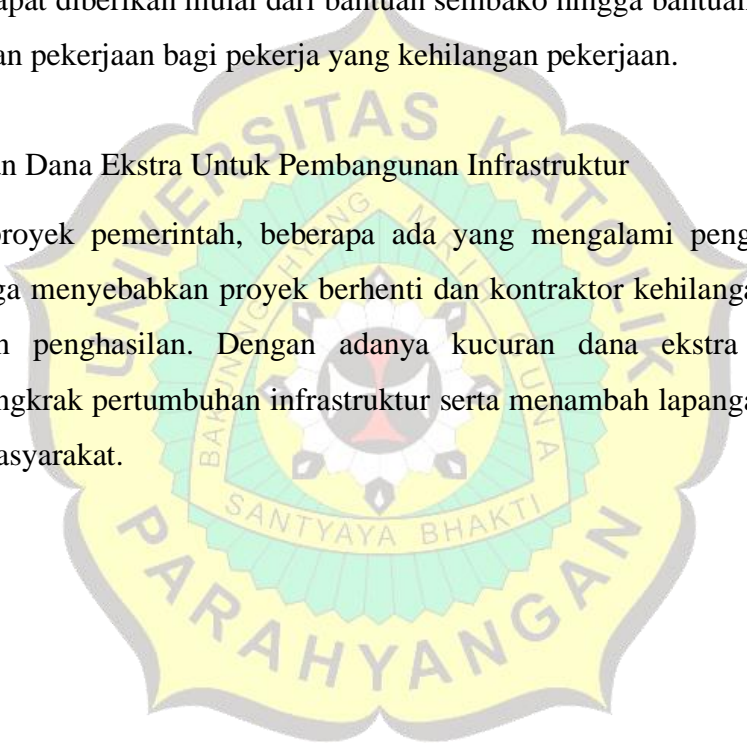
pajak agar lebih banyak kontraktor yang menerima bantuan tersebut karena kontraktor juga mengalami banyak kerugian.

3. Memberi Bantuan Kepada Pekerja

Upah pekerja bersifat harian ketika ada proyek yang berlangsung sedangkan di beberapa tempat terjadi pemberhentian proyek. Ini berarti para pekerja tidak berpenghasilan saat tidak ada proyek konstruksi berlangsung. Upaya ini diharapkan supaya lama kelamaan para pekerja yang kehilangan pekerjaan ini menjadi gelandangan dan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan yang dapat diberikan mulai dari bantuan sembako hingga bantuan pembukaan lapangan pekerjaan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

4. Kucuran Dana Ekstra Untuk Pembangunan Infrastruktur

Pada proyek pemerintah, beberapa ada yang mengalami pengalihan dana sehingga menyebabkan proyek berhenti dan kontraktor kehilangan pekerjaan maupun penghasilan. Dengan adanya kucuran dana ekstra tentu akan mendongkrak pertumbuhan infrastruktur serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Sidik, S. (2020, 10 11). *Dampak COVID-19, Proyek WIKA Mangkrak & Laba Bisa Drop 50%*. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200528141824-17-161514/dampak-COVID-19-proyek-wika-mangkrak-laba-bisa-drop-50> pukul 23.00
- Detikcom, T. (2020, 10 11). *Sebaran Kasus Corona RI Per 11 Oktober, DKI-Sumbar Terbanyak*. Sebaran Kasus Corona RI Per 11 Oktober, DKI-Sumbar Terbanyak. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-5209140/sebaran-kasus-corona-ri-per-11-oktober-dki-sumbar-terbanyak> pada 11 Oktober 2020 pukul 23.00
- HADIMULJONO, M. B. (2020). *INMEN PEKERJAAN UMUM NOMOR 022020*.
- Indrawati, S. M. (2020). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-247MK.072020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang Jasa DAK Fisik 2020.pdf*.
- Pratomo, M. N. (2020,10 11). *Banyak Proyek Ditunda Akibat Pandemi, Sektor Konstruksi Diprediksi Melambat*. Diambil kembali dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200521/45/1243417/banyak-proyek-ditunda-akibat-pandemi-sektor-konstruksi-diprediksi-melambat> pada 11 Oktober 2020 pukul 23.00
- Widodo, J. (2020). *inpres-nomor-4-tahun-2020*.
- Adiputra, T. (2020). *Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Fasilitas Observasi COVID-19 Pulau Galang*. *Virama Karya Engineering & Management Consultant* (p. 40). Virama Karya Engineering & Management Consultant. Dipetik 1 15, 2021
- Asmoadji, A. (2020). *Webinar Manajemen Konstruksi & Dampak COVID-19*. *Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia* (p. 37). Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Baswedan, A. (2020). *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah*

- Khusus Ibukota Jakarta*. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dipetik 1 15, 2021
- Danial, O. M. (2020). *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Wali Kota Bandung. Bandung: Wali Kota Bandung. Dipetik 1 15, 2021
- Direktorat Bina Penyelenggaraan Konstruksi. (2020). Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Konstruksi. *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi* (p. 16). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dipetik 1 15, 2021
- Ginjar, D. (2020). Rencana Operasi Apabila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diberlakukan Di Kota Bekasi. *Pemerintah Kota Bekasi* (p. 20). Bekasi: Dinas Perhubungan. Dipetik 1 15, 2021
- Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19* . (2020). Washington DC, Washington DC, United States of America: U.S. Department of Labor.
- Hardjomuljadi, S. (2020). COVID-19 : FIDIC GUIDANCE MEMORANDUM. *Ikatan Nasional Konsultan Indonesia* (p. 16). Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Hartarto, A. (2020). 2021 : The Year of Opportunity ,Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia* (p. 15). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Harvard Business Review. (2020). *Coronavirus and Business : The Insights You Need from Harvard Business Review*. Cambridge, Massachusetts, United States of America: Harvard Business School Publishing Corporation. Dipetik 1 15, 2021
- Indrawati, S. M. (2020). *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Irwanti. (2020). COVID-19 Impacts. In Irwanti (Ed.), *PT Schroder Investment Management Indonesia* (p. 24). Jakarta: PT Schroder Investment Management Indonesia. Dipetik 1 15, 2021

- Jaya, I. (2020). Indonesia's Economic Condition During COVID-19. *Commonwealth Bank*, (p. 9). Dipetik 1 15, 2021
- Kamil, M. R. (2020). *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang*. Gubernur Jawa Barat. Bandung: Gubernur Jawa Barat. Dipetik 1 15, 2021
- Kamil, M. R. (2020). *Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat*. Gubernur Jawa Barat. Bandung: Gubernur Jawa Barat. Dipetik 1 15, 2021
- Kamil, M. R. (2020). *Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bandung: Gubernur Jawa Barat.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2020). Program Mitigasi Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Menangani Dampak COVID-19. *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia* (p. 12). Jakarta: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Kesehatan, D. J. (2020). Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah COVID-19. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (p. 27). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nugraha, A. S. (2020). Keadaan Kahar (COVID-19) Dalam Kontrak Konstruksi Berbasis Best Practice Fidic Condition of Contract dan Peraturan Indonesia Terkait., (p. 29).
- Pandjaitan, L. B. (2020). *Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Pardede, R. (2020). *Perkembangan Ekonomi Dunia dan Indonesia Serta Respon Kebijakan Terhadap Krisis COVID-19*. Jakarta. Dipetik 1 15, 2021

- Philippe. (2020). The New Low Touch Economy : How to Navigate The World After COVID-19. *Board Of Innovation* (hal. 35). Board Of Innovation. Dipetik 1 15, 2021
- Pritasari, K. (2020). *Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- PT. Waskita Karya (PERSERO) Tbk. (2020). Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 19., (p. 62). Dipetik 1 15, 2021
- Putranto, T. A. (2020). Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia* (p. 39). Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Putranto, T. A. (2020). *Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Putranto, T. A. (2020). *Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021
- Septiani, A. (2020, 11 2). *Detik.com*. Dipetik 11 2, 2020, from Health.detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5198681/2-provinsi-nihil-ini-5-provinsi-terbanyak-kasus-baru-covid-19-per-3-oktober>
- Septiani, A. (2020, 11 2). *Detik.com*. Dipetik 11 2, 2020, from health.Detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5271705/10-provinsi-tertinggi-kasus-covid-19-indonesia-26-november>
- Sihombing, L. B. (2020). Dampak COVID-19 pada Industri Konstruksi dan Tantangannya Pasca COVID-19 di Indonesia : Tinjauan dari sisi Manajemen Resiko Proyek, Program, dan Portofolio. Dipetik 1 15, 2021

Sinergy, P. A. (2020, 10 12). *Amarta Consulting*. Dipetik 10 12, 2020, from Amarta Consulting Web Site: <https://www.ijintender.co.id/usaha-jasa-pelaksanaan-konstruksi-kontraktor>

Susanto, R. D. (2020). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dipetik 1 15, 2021

Widodo, J. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dipetik 1 15, 2021



